Sosialisasi PER-17/PB/2025

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

2 Oktober 2025

KEMENKEU MELAYANI LEBIH BAIK

Peran Strategis Organisasi dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025

Setditjen Perbendaharaan

Pengaturan Jam Layanan pada Bulan Desember 2025

LATAR BELAKANG

1. Pemenuhan kebutuhan manajerial KPPN untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Dalam rangka pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan kepada *stakeholders* untuk mengurangi potensi penumpukan SPM pada akhir batas waktu penyampaian SPM.
3. Penyesuaian atas kondisi tertentu yang membutuhkan kebijakan untuk KPPN dan Kanwil DJPb dalam mengatur jam layanan yang lebih fleksibel.

Ketentuan Jam Layanan untuk proses penyelesaian tagihan pada Bulan Desember 2025

1. KPPN membuka layanan **mulai pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 waktu setempat** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila diperlukan,**KPPN dapat mengatur dan membuka layanan di luar jam layanan t**ermasuk pada Hari Libur Nasional atau Hari Sabtu-Minggu **setelah mendapat izin dispensasi dari Kepala Kanwil DJPb**.

Pengajuan Dispensasi oleh KPPN

KPPN mengajukan izin dispensasi kepada Kepala Kanwil DJPb **setelah melakukan koordinasi dan komunikasi** dengan Satker.

Pertimbangan Pemberian Dispensasi oleh Kepala Kanwil DJPb

1. **Kebutuhan yang mendesak** untuk segera menyelesaikan tagihan kepada negara; dan
2. Keperluan **waktu tambahan untuk verifikasi SPM** beserta dokumen pendukungnya dalam rangka menjaga validitas, akurasi,dan akuntabilitas dalam pembayaran atas belanja negara.

Critical point dan Strategi Keberlangsungan Layanan pada Akhir Tahun 2025

Strategi Keberlangsungan Layanan:

Apabila terdapat keadaan mendesak (khusus):

1. Berkomunikasi dengan satker terkait **kepentingan yang dikategorikan sebagai keadaan mendesak**.
2. Secara intensif berkomunikasi dengan Kanwil DJPb dan Kantor Pusat DJPb terhadap **potensi pemberian dispensasi** kepada satker.

Apabila terjadi keadaan kahar:

1. **Memberikan informasi** terhadap Satker terkait kondisi yang terjadi, **agar dapat menenangkan satker** serta memberikan kepastian layanan.
2. **Menyiapkan strategi** untuk menjaga keberlangsungan layanan:
   a. **Strategi komunikasi** dalam hal terjadi gangguan layanan;
   b. **Respon cepat** masukan stakeholders;
   c. **Komunikasi intensif** dengan Kanwil dan Kantor Pusat; dan
   d. **Dokumentasi** kronologis keadaan.

Critical Point:

- Mekanisme penyelesaian SPM menggunakan **RPATA, akan** berdampak pada peningkatan jumlah pengajuan SPM pada akhir tahun.
- Terdapat **potensi dispensasi Jam Layanan** yang dibuka pada pukul 08.00 s.d. 17.00 waktu setempat.
- Kanwil DJPb dapat **memberikan dispensasi** untuk **pelayanan selain hari kerja.**
- Kanwil DJPb dan KPPN memastikan **kesiapan SDM, infrastruktur, dan jaringan** dalam menghadapi akhir tahun.

Persiapan Keberlangsungan Bisnis

Implementasi MKB

01

Internalisasi

Melakukan *sharing knowledge* pada seluruh Pegawai tentang pengaturan dalam Perdirjen Nomor **PER-17/PB/2025** tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, serta menyusun strategi dan peran tiap-tiap pegawai.

Melakukan mapping dan mempersiapkan strategi *support system* pada unit teknis.

02

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi seluas-luasnya tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh *stakeholder* yang dilayani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN.

Pelaksanaan *Mapping* kualitas dan kapasitas pelaksanaan Anggaran pada *Stakeholder*

03

Simulasi

Pelaksanaan uji coba langkah-langkah kesiapsiagaan ketika terjadi kondisi yang berada di luar pengaturan.

Pelaksanaan simulasi pada **Kantor Vertikal** mengacu pada pengalaman pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun anggaran tahun 2024

Kontrak, Penyampaian SPM, Kartu Kredit Pemerintah, Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur, dan Penyelesaian Uang Persediaan

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pendaftaran Data Kontrak

Satker menyampaikan pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak yang akan dibayarkan dengan mekanisme SPM-LS paling lambat **5 (lima) Hari Kerja** setelah kontrak atau perubahan kontrak ditandatangani.

Tanggal Penandatanganan Kontrak/Perubahan Kontrak	Batas Waktu Pendaftaran Kontrak/ Perubahan Kontrak ke KPPN	Batas Waktu Penerbitan NRK oleh KPPN
s.d. 30 September 2025	7 Oktober 2025	2 HK setelah kontrak diterima
1 s.d. 31 Oktober 2025	7 November 2025	2 HK setelah kontrak diterima
1 s.d. 30 November 2025	5 Desember 2025	2 HK setelah kontrak diterima dan paling lambat 5 Desember 2025
1 s.d. 5 Desember 2025	8 Desember 2025	2 HK setelah kontrak diterima dan paling lambat 23 Desember 2025
6 s.d. 12 Desember 2025	15 Desember 2025	
13 s.d. 17 Desember 2025	19 Desember 2025	
18 s.d. 22 Desember 2025	23 Desember 2025	

KPPN **tetap menerima** pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak yang melewati 5 (lima) Hari Kerja sepanjang tidak melewati batas waktu. (Lampiran surat pernyataan alasan keterlambatan penyampaian data kontrak atau perubahan data kontrak).

Gaji Induk/ Gaji PPPK/ Penghasilan PPNPN bulan Januari 2026

Jenis SPM-LS	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
Gaji Induk/ Gaji PPPK/ Penghasilan PPNPN bulan Januari 2026	8 Desember 2025	30 Desember 2025
Gaji Induk Januari 2026 pada Satker **Platform Pembayaran Pemerintah**	15 Desember 2025	
Tunjangan kinerja yang dibayarkan tanggal 1 Januari 2026 dengan DIPA TA 2026	19 Desember 2025	

*(diberi tanggal **1 Januari 2026**)*

Rekonsiliasi Gaji Induk Januari 2026

Rekonsiliasi gaji induk bulan Januari 2026 dapat dilakukan mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan batas akhir penyampaian SPM-LS gaji induk ke KPPN.

Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur Desember 2025

Uang makan dan/atau belanja uang lembur bulan Desember 2025 dibayarkan dengan menggunakan mekanisme **UP/TUP Tunai** dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Tahun 2025.

Uang Makan & Uang Lembur Des 2025

- mekanisme UP/TUP Tunai
- mempunyai Bendahara Pengeluaran namun tidak memiliki UP → Satker mengajukan permohonan UP ke KPPN
- tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran → SPM-LS kepada Penerima

Uang Makan/Uang Lembur LS kepada Penerima

1. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 1-15 Des 2025 ditambahkan frasa "Pembayaran Uang Makan/Lembur tanggal 1 - 15 Desember 2025".
2. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 16-31 Des 2025 ditambahkan frasa "Pembayaran Uang Makan/Lembur tanggal 16-31 Desember 2025" disertai SPTJM.
3. Tehadap pembayaran Uang makan dan uang lembur tanggal 16 s.d. 31 Desember 2025 PPK memperhitungkan kesesuaian kehadiran pegawai dan menyetorkan ke Kas Negara dalam hal terjadi kelebihan pembayaran

Jenis SPM	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian (KPPN)
SPM UP/TUP Tunai	5 Desember 2025	9 Desember 2025
SPM-LS kepada Penerima	18 Desember 2025	22 Desember 2025

Pengajuan SPM-LS Non Kontraktual ke KPPN

Jenis SPM-LS	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN	12 Desember 2025	16 Desember 2025
SPM-LS Non Kontraktual **selain** Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN	22 Desember 2025	29 Desember 2025

Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN

Dalam hal SPM-LS non kontraktual untuk pembayaran Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN ditujukan untuk pembayaran bulan Desember 2025 dapat diajukan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM, sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

SPM-LS Non Kontraktual selain Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN

Termasuk SPM-LS gaji susulan, SPM-LS kekurangan gaji, SPM-LS gaji terusan, SPM-LS uang makan, SPM-LS uang lembur, dan SPM-LS perjalanan dinas untuk pejabat/pegawai/penerima hak.

Pengajuan SPM-UP/GUP/TUP ke KPPN

Jenis SPM-UP/GUP/TUP	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian KPPN
Permohonan persetujuan TUP Tunai/TUP KKP	3 Desember 2025	4 Desember 2025
SPM-UP Tunai, SPM-TUP Tunai, dan SPM-GUP *(dilampiri surat persetujuan pemberian TUP Tunai)*	5 Desember 2025	9 Desember 2025

Permohonan persetujuan TUP Tunai

- Permohonan persetujuan TUP Tunai dilampiri:
  a. Rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang ditandatangani oleh KPA; dan
  b. Surat pernyataan dari KPA.
- Permohonan persetujuan TUP Tunai dan/atau TUP KKP, rincian rencana penggunaan TUP Tunai, Surat pernyataan dari KPA, dan persetujuan/persetujuan sebagian/penolakan TUP Tunai dan/atau TUP KKP dihasilkan dari aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN

BAST/BAPP	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian KPPN
s.d. 30 September 2025	7 Oktober 2025	sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan
1 s.d. 15 Oktober 2025	22 Oktober 2025	
16 s.d. 31 Oktober 2025	7 November 2025	
1 s.d. 15 November 2025	21 November 2025	
16 s.d. 30 November 2025	5 Desember 2025	9 Desember 2025
1 s.d. 7 Desember 2025	9 Desember 2025	11 Desember 2025
8 s.d. 14 Desember 2025	16 Desember 2025	18 Desember 2025
15 s.d. 18 Desember 2025	22 Desember 2025	24 Desember 2025
19 s.d. 23 Desember 2025	23 Desember 2025	30 Desember 2025

Penyelesaian Uang Persediaan

Penyetoran sisa UP/TUP

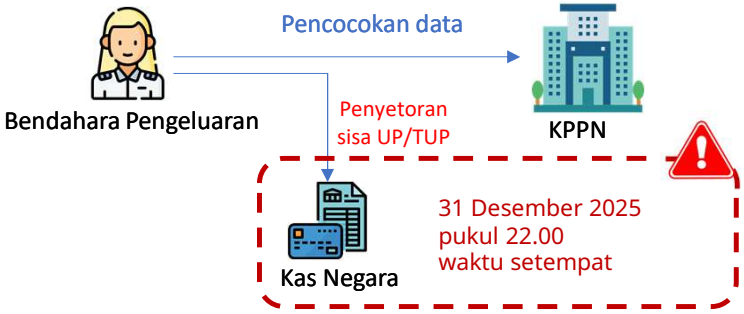

1. Bendahara Pengeluaran **menyetorkan seluruh sisa UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2025** dengan menggunakan sistem penerimaan negara secara elektronik paling lambat tanggal **31 Desember 2025 pukul 22.00 waktu setempat** dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP.
2. Bendahara Pengeluaran **wajib melakukan pencocokan data UP/TUP** dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran nilai sisa UP/TUP Tunai yang harus disetor yaitu untuk posisi sisa UP/TUP periode tanggal 31 Desember 2025 **pukul 15.00 waktu setempat.**
3. KPA melakukan **pengawasan dan memastikan kepatuhan** Bendahara Pengeluaran dalam menyetorkan sisa UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2025
4. Kepala KPPN menyampaikan **teguran** kepada Satker termasuk Satker yang tidak memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya dalam hal tidak menyetorkan sisa UP/TUP Tahun Anggaran 2025 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penyelesaian UP

Jenis SPM-LS	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
SPM-GUP Nihil/PTUP	8 Januari 2026	12 Januari 2026

SPM-GUP Nihil/PTUP

1. Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP disampaikan setelah tahun anggaran 2025 berakhir diberi tanggal 31 Desember 2025 dan pada uraian SPM ditambahkan frasa “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP Tunai tahun anggaran 2025".
2. Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP untuk proyek yang didanai dengan pinjaman/hibah luar negeri yang *closing-date*-nya tanggal 31 Desember 2025 diterima KPPN **paling lambat tanggal 29 Desember 2025,** dan diselesaikan KPPN paling lambat 30 Desember 2025.
3. Dalam hal Satker tidak memperoleh DIPA pada TA berikutnya namun masih terdapat UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan dan/atau sisa UP/TUP Tunai yang belum disetorkan sampai batas waktu, Kepala KPPN menyampaikan **surat teguran** kepada KPA.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Jenis SPM-LS	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian KPPN
Permohonan persetujuan TUP KKP	3 Desember 2025	4 Desember 2025
SPM-GUP KKP/PTUP KKP *(didasarkan pada tagihan/e-billing statement sistem perbankan)*	18 Desember 2025	22 Desember 2025

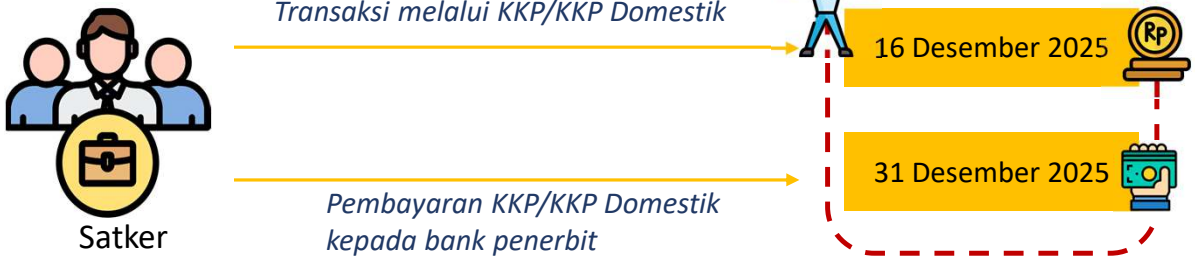

Pengeluaran Negara atas Beban DIPA BA BUN

Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025

a. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;
b. Belanja Subsidi;
c. Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;
d. Belanja Transfer ke Daerah;
e. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;
f. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
g. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
h. Pemberian Pinjaman / Penerusan Pinjaman;
i. Penerusan Hibah;
j. Investasi Pemerintah;
k. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
l. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain huruf a s.d. huruf k

Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang disahkan pada TA 2026

a. Pengesahan atas SPM untuk transaksi belanja subsidi BM-DTP dan P-DTP;
b. Pengesahan penambahan Investasi Pemerintah dari saldo kas pada BLU;
c. Pengesahan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Beban DIPA BA BUN TA 2026 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025

a. Belanja Dana Alokasi Umum (DAU);
b. Belanja Pensiun;
c. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri;
d. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Luar Negeri.

Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025

Jenis SPM-LS	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
Belanja Transfer ke Daerah	23 Desember 2025	31 Desember 2025
Belanja DIPA BA BUN TA 2025 yang dibayarkan s.d. akhir TA 2025 **selain** Transfer ke Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2025

a. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;
b. Belanja Subsidi;
c. Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;
d. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;
e. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
f. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
g. Pemberian Pinjaman / Penerusan Pinjaman;
h. Penerusan Hibah;
i. Investasi Pemerintah;
j. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
k. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain huruf a s.d. huruf j

Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang disahkan pada TA 2026

Jenis SPM	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
SPM Pengesahan BM-DTP dan P-DTP	30 Januari 2026	2 HK setelah SPM diterima *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*
SPM pengesahan penambahan Investasi Pemerintah dari saldo kas BLU	12 Januari 2026	2 HK setelah SPM diterima *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*
SPM pengesahan Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	19 Januari 2026	2 HK setelah SPM diterima *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*

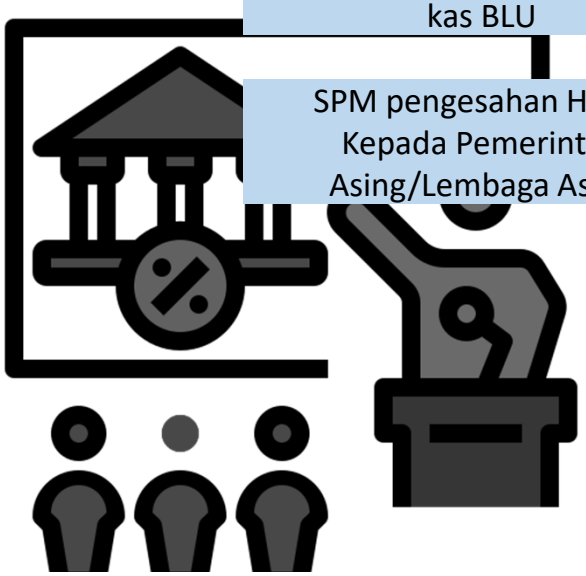

Beban DIPA BA BUN TA 2026 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025

Jenis SPM-LS	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
SPM-LS DAU Januari 2026	23 Desember 2025	31 Desember 2025 *(diberi tanggal 2 Januari 2026)*
SPM-LS Belanja Pensiun Januari 2026	23 Desember 2025	31 Desember 2025 *(diberi tanggal 2 Januari 2026)*
SPM-LS Utang Dalam Negeri tagihan 2 Jan 2026	29 Desember 2025	2 Januari 2026 *(diberi tanggal 2 Januari 2026)*
SPM-LS Utang Dalam Negeri tagihan 5 Jan 2026	30 Desember 2025	5 Januari 2026 *(diberi tanggal 5 Januari 2026)*
SPM-LS Utang Luar Negeri tanggal valuta 2 Jan 2025	23 Desember 2025	30 Desember 2025 *(diberi tanggal 2 Januari 2026)*
SPM-LS Utang Luar Negeri tanggal valuta 5 Jan 2025	24 Desember 2025	30 Desember 2025 *(diberi tanggal 5 Januari 2026)*

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pada Akhir Tahun Anggaran dan Retensi/Biaya Pemeliharaan

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pengajuan SPM Akhir Tahun Anggaran ke KPPN

SPM Akhir Tahun

- Pekerjaan kontraktual
- Pekerjaan non kontraktual darurat bencana

BAST
23-31 Desember 2025

Paling Lambat Diterima KPPN

23 Desember 2025

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Pengajuan SPM sebesar:

a. sisa nilai kontrak yang belum diselesaikan; atau

b. nilai perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Tindak Lanjut RPATA

Terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran → **Pembayaran,** utk memindah-bukukan ke Rek Penyedia

Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya →
- **Pembayaran**, atas prestasi; dan/atau
- **Penihilan**, mengembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan

Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi kriteria → Pemberian Kesempatan paling lama 90 HK

Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak selesai, namun tidak memenuhi kriteria RPATA maka:

Pengajuan lanjutan pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang belum selesai untuk kegiatan kontrak tahun tunggal/jamak berpedoman pada ketentuan masing-masing PMK/PerUU sesuai sumber pendanaan.

SPM Biaya Pemeliharaan (Retensi)

Pembayaran Biaya pemeliharaan

Pelaksanaan pekerjaan fisik harus sudah selesai 100% (seratus persen)

SPM untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) dapat diterbitka tersendiri/terpisah atau disatukan dengan pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik

Melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan pada uraian SPM

1. Pekerjaan yang tidak terselesaikan tetapi mensyaratkan pemeliharaan, pembayaran hanya memperhitungkan sebesar prestasi dari persentase porsi fisik dalam kontrak.
2. Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima.

Penatausahaan jaminan pemeliharaan dilakukan oleh PPSPM

Pengesahan BLU, Administrasi Hibah Langsung, Akuntansi dan Pelaporan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pengesahan SP3B BLU

Penyampaian SP3B BLU ke KPPN

Oktober
Minimal 1 (satu) kali

November
Minimal 1 (satu) kali

Desember
Minimal 2 (dua) kali

sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu

Mengikuti ketentuan berikut:

Jenis SP3B BLU	Paling Lambat Diterima	Batas Akhir Penyelesaian
Realisasi 1 s.d. 12 Desember 2025	19 Desember 2025	24 Desember 2025
Realisasi 12 s.d. 31 Desember 2025	7 Januari 2026	12 Januari 2025 *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*

KPPN melakukan rekonsiliasi Rekening Transito pada tanggal penerbitan SP2B BLU.

Pengesahan Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Non Anggaran

Jenis SPM Pengesahan	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
Belanja modal tanah PSN*)	19 Januari 2026 *(diberi tanggal 31Desember 2025)*	21 Januari 2026 *(diberi tanggal 31Desember 2025)*

Sumber pendanaan dari BLU LMAN

engesahan Belanja Modal PSN dilakukan oleh Satker yang melaksanakan pengadaan tanah bagi proyek strategis onal sesuai PMK 139/2020 j.o. PMK 95/2023.

Belanja barang/modal dengan potongan penerimaan BUN KPPN/ potongan penerimaan non anggaran **)	7 Januari 2026 *(diberi tanggal 31Desember 2025)*	9 Januari 2025 *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*

Sumber pendanaan dari BLU BPDLH

**) Pengesahan Belanja barang/modal:

a. Pengesahan Belanja barang/modal dengan **potongan penerimaan BUN** → dilakukan oleh Satker pada Ditjen PDASRH-Kementerian Kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, dengan mitra KPPN Jakarta 7.
b. Pengesahan Belanja barang dengan **potongan penerimaan non anggaran** → direncanakan akan dilakukan oleh Satker pada Setjen Kementerian Sekretariat Negara, Setjen Kementerian Agama, dan Setjen Kementerian Kesehatan untuk pembelian premi asuransi BMN (piloting penyaluran dana *Pooling Fund* Bencana/PFB).

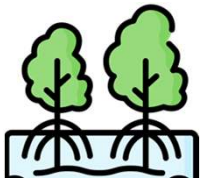

Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (1)

Hibah langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga

- Realisasi tahun anggaran yang lalu
- Realisasi tahun anggaran 2025

a. Hibah langsung dalam bentuk uang realisasi tanggal 1 Januari 2025 s.d. 19 Desember 2025
b. Hibah langsung dalam bentuk uang realisasi setelah tanggal 19 Desember 2025
c. Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima s.d. tanggal 31 Desember 2025

Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu & 1 Januari s.d 19 Desember 2025

Pengajuan	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
Permohonan surat izin pembukaan rekening	19 Desember 2025	24 Desember 2025
Pengajuan Usulan Revisi Anggaran Hibah	29 Desember 2025	29 Desember 2025

Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Realisasi Setelah Tanggal 19 Desember 2025

Pengajuan	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian
Permohonan surat izin pembukaan rekening	30 Desember 2025	30 Desember 2025
Pengajuan Usulan Revisi Anggaran Hibah	30 Desember 2025	30 Desember 2025

Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (2)

Penyampaian SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS ke KPPN dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan untuk bulan Oktober 2025 dan bulan November 2025, diselesaikan sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu.

Pengajuan	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian KPPN
SP2HL/SP4HL transaksi 1 Jan 2025-19 Des 2025	7 Januari 2026	9 Januari 2026 *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*
SP2HL/SP4HL transaksi Tahun Anggaran Yang Lalu	7 Januari 2026	9 Januari 2026 *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*
SP2HL/SP4HL transaksi setelah 19 Des 2025	7 Januari 2026	12 Januari 2026 *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*
MPHL-BJS realisasi s.d. 31 Des 2025	7 Januari 2026	12 Januari 2026 *(diberi tanggal 31 Desember 2025)*

SP2HL/SP4HL

MPHL-BJS

SPHL/SP3HL

Penarikan PHLN dan PDN

Satker mengajukan Surat Penarikan Dana melalui Pembayaran Langsung atau Pembiayaan Pendahuluan ke KPPN KPH paling lambat diterima oleh KPPN KPH **2 (dua) Hari Kerja** sebelum batas waktu pengajuan yang ditentukan oleh pemberi PHLN dan/atau PDN.

Dalam hal tidak terdapat ketentuan batas waktu dari pemberi PHLN dan/atau PDN Surat Penarikan Dana, Surat Penarikan Dana diterima KPPN KPH paling lambat tanggal **28 November 2025** pada Jam Kerja.

Dalam hal terdapat realisasi *direct payment* dan/atau *letter of credit* yang melebihi pagu anggaran, Satker dapat mengajukan **usulan revisi anggaran** sepanjang masih dalam sumber dana yang sama maksimal sebesar nilai penerimaan pembiayaan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Akuntansi dan Pelaporan (1)

Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan

Transaksi Keuangan

Transaksi BMN

Diproses & Disajikan dalam LK

Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data LK secara Harian

Data LK yang Relevan dan Handal secara periodik

Transaksi	Batas Akhir Penyelesaian
s.d 30 September 2025	15 Oktober 2025
s.d 31 Oktober 2025	14 November 2025
s.d 30 November 2025	15 Desember 2025
s.d 31 Desember 2025	23 Januari 2026

Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Ketentuan Penerbitan SHR

REKONSILIASI INTERNAL

1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara
2. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB
3. Rekonsiliasi UAKPA dengan Pengelola Piutang

REKONSILIASI EKSTERNAL

1. Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah
2. Pelaksanaan rekonsiliasi secara otomatis sesuai dengan ketentuan OLAP

Transaksi	Batas Akhir Penyelesaian
s.d 30 September 2025	15 Oktober 2025
s.d 31 Oktober 2025	14 November 2025
s.d 30 November 2025	15 Desember 2025
s.d 31 Desember 2025	23 Januari 2026

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

a. Tidak terdapat **TDK Rupiah dan TDK CoA** atau telah disetujui KPPN;
b. Tidak terdapat kualitas data pada *To Do List*; dan
c. Telah melakukan tutup periode permanen pada GLP

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

Satker segera **menyelesaikan transaksi** keuangan dan transaksi BMN sesuai dengan periode

Tutup periode permanen secara bulanan

LK tingkat UAKPA s.d UAPA mengungkapkan **capaian kinerja**

> Penyusunan Lapkeu lingkup KL berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai SAI

> Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur jadwal penyelesaian transaksi keuangan dan barang milik negara, dan rekonsiliasi eksternal.

Akuntansi dan Pelaporan (2)

Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga

Laporan Keuangan Unit Akuntansi lingkup KL

Secara berjenjang dan
batas waktu diatur oleh masing-masing KL

Dilampiri LKjKL

28 Februari 2026

- UAPA → DJPb c.q Dit. APK
- UAPPA-E1
- UAPPA-W → Kanwil DJPb
- UAKPA → KPPN

> Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat mengatur jadwal penyampaian Laporan Keuangan.

Penyampaian LPJ Bendahara

- **Dit. PKN**
  - ↑ 3 HK setelah batas akhir penyampaian LPJ KPPN ke Kanwil
- **Kanwil Ditjen Perbendaharaan**
  - ↑ 3 HK setelah batas akhir penyampaian LPJ Satker ke KPPN
- **KPPN**
  - ↑ 3 HK sebelum Batas akhir rekonsiliasi KPPN dengan UAKPA*)
- **Satuan kerja**

*) Dalam hal terdapat perubahan pencatatan transaksi kas yang mempengaruhi LPJ Bendahara bulan Desember 2025,dapat dilakukan perbaikan dan penyampaian kembali ke KPPN.

Penyampaian Laporan Keuangan pada Bendahara Umum Negara

> Ketentuan terkait penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan pada Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2025 diatur oleh **Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.**

Penyelesaian Retur, Ketentuan Lain – Lain, Perencanaan Kas, dan Pengajuan di Luar Batas Waktu

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Penyelesaian Retur dan Ketentuan Lain-Lain

Penyelesaian Retur

Paling Lambat Diterima KPPN

19 Des 2025

Batas Akhir Penyelesaian KPPN

23 Des 2025

Dalam hal surat ralat/SPPK tidak dapat disampaikan sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 pada Jam Kerja, maka dapat diajukan pada tahun berikutnya paling lambat tanggal **15 Januari 2026.**

Ketentuan Lain-Lain

Kanwil DJPb dan KPPN melakukan **koordinasi dengan mitra kerja** antara lain Kantor Bank Indonesia setempat, *Collecting Agent*, dan instansi terkait.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan **membentuk tim** dengan Kanwil Pajak dan Kanwil DJBC dalam melakukan koordinasi dengan *Collecting Agent*

Kanwil DJPb dan KPPN mengambil **langkah-langkah** yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam hal terjadi perubahan layanan ***Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*** **(BI-RTGS)** dan/atau **pengeluaran negara atas beban BA BUN**, dapat dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara.

PERENCANAAN KAS *(CASH FORECASTING)*

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, perencanaan kas menggunakan dua pendekatan: Top Down dan Bottom Up

- TIM KOORDINASI -

Cash Planning Information Network
(CPIN)

- djp — Proyeksi Perpajakan
- Proyeksi Bea dan Cukai
- djppr — Proyeksi Pembiayaan Utang
- Proyeksi PNBP dan Belanja Pempus
- Proyeksi TKDD
- DJKN — Proyeksi Investasi

1. Beranggotakan perwakilan Unit Es. I Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya mengelola pengeluaran dan/atau penerimaan Negara
2. Tim Koordinasi / CPIN melakukan penyusunan Proyeksi Penerimaan dan Proyeksi Pengeluaran.
3. Tim Koordinasi dapat melakukan pemutakhiran proyeksi penerimaan dan proyeksi pengeluaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 28 November 2025.

Top Down

Cash Forecasting

DJPb Indonesian Treasury

c.q. Dit PKN

direktorat Pengelolaan Kas Negara

Bottom Up

Satuan Kerja

1. Satker menyusun **proyeksi pengeluaran bulanan mulai Oktober s.d. Desember 2025** paling lambat **hari kerja kelima bulan berkenaan**
2. Proyeksi pengeluaran bulanan dapat **dimutakhirkan** paling lambat **hari kerja kesepuluh**

Badan Layanan Umum

1. Satker BLU menyusun proyeksi penerimaan dan proyeksi pengeluaran bulanan mulai Oktober s.d. Desember 2025 paling lambat hari kerja kelima bulan berkenaan kepada Dit PPK BLU.
2. Proyeksi pengeluaran bulanan dimutakhirkan paling lambat hari kerja kesepuluh

Pengajuan di Luar Batas Waktu

Direktur Pelaksanaan Anggaran	Data kontrak/perubahan data kontrak, Permohonan Persetujuan TUP Tunai, dan/atau SPM, beserta penyelesaiannya oleh KPPN
Direktur Pengelolaan Kas Negara	Penyelesaian surat ralat/Surat Permohonan Pembayaran Kembali (SPPK) retur SP2D
Direktur Sistem Perbendaharaan	SPM RPATA (Penampungan, Pembayaran, dan Penihilan)
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jadwal pelaksanaan penyelesaian transaksi keuangan, rekonsiliasi, laporan keuangan, dan penyampaian surat pengesahan

atas nama
Direktur Jenderal Perbendaharaan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

OKTOBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			1	2	3	4
5	6	**7**	8	9	10	11
12	13	14	**15**	16	17	18
19	**20**	21	**22**	23	24	25
26	27	28	29	30	**31**	

7

- Pendaftaran Kontrak/Addendum s.d. 30 Sep 25
- SPM-LS BAST/BAPP s.d. 30 Sep 25

15/ 20

- Transaksi keuangan dan BMN, serta Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 30 Sep 25

22

- SPM-LS BAST/BAPP 1 s.d. 15 Okt 25

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NOVEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
						1
2	3	4	5	6	**7**	8
9	10	11	12	13	**14**	15
16	**17**	18	19	20	**21**	22
23	24	25	26	27	**28**	29
30						

7

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 1 s.d. 31 Okt 25
- SPM-LS BAST/BAPP 16 s.d. 31 Okt 25

14

- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 31 Okt 25

17

- Mulai rekonsiliasi gaji induk bulan Jan 26

21

- SPM-LS BAST/BAPP 1 s.d. 15 Nov 25

28

- Pengajuan Surat Penarikan Dana PHLN dan/atau PDN
- Pemutakhiran proyeksi penerimaan dan pengeluaran oleh Tim Koordinasi

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

DESEMBER 2025

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	**3**	4	**5**	6
7	**8**	**9**	10	11	**12**	13
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	20
21	**22**	**23**	**24**	25	26	27
28	**29**	**30**	**31**			

3
- Pengajuan Persetujuan TUP

5
- Pendaftaran Kontrak/Addendum 1 s.d. 30 Nov 25
- SPM-UP Tunai, SPM-TUP Tunai, SPM GUP
- SPM-LS BAST/BAPP 16 s.d. 30 Nov 25

8
- Pendaftaran Kontrak/Addendum 1 s.d. 5 Des 25
- SPM LS Gaji Induk Januari 2026

9
- SPM-LS BAST/BAPP 1 s.d. 7 Des 25

12
- SPM-LS Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNPN

15
- Pendaftaran Kontrak/Addendum 6 s.d. 12 Des 25
- SPM LS Gaji Induk Januari 2026 Satker Penguna PPP
- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 30 Nov 25

16
- SPM-LS BAST/BAPP 8 s.d. 14 Des 25
- Penggunaan KKP/KKP Domestik

17
- SPM-KP/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB/SPM-PP

18
- SPM LS Uang Makan dan Uang Lembur Des 25
- SPM-GUP/SPM-PTUP KKP

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

DESEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	**3**	4	**5**	6
7	**8**	**9**	10	11	**12**	13
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	20
21	**22**	**23**	**24**	25	26	27
28	**29**	**30**	**31**			

19

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 13 s.d. 17 Des 25
- SP3B BLU Realisasi 1 s.d. 12 Des 25
- Surat ralat/SPPK atas Retur SP2D

22

- SPM-LS BAST/BAPP 15 s.d. 22 Des 25
- SPM-LS Non Kontraktual

23

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 18 s.d. 22 Des 25
- SPM-LS BAST/BAPP 19 s.d. 23 Des 25
- SPM Akhir Tahun Anggaran
- SPM-LS Belanja Transfer ke Daerah, DAU Jan 2026, Bel Pensiun 26
- SPM-LS kewajiban Utang LN valuta 2 Jan 26
- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN transaksi s.d. 31 Des 25

24

- SPM-LS kewajiban Utang LN valuta 5 Jan 26

29

- SPM-LS kewajiban Utang DN tagihan 2 Jan 26
- Pengajuan revisi anggaran Hibah Langsung Uang Realisasi 1 Jan s.d. 19 Des 25

30

- SPM-LS kewajiban Utang DN tagihan 5 Jan 25
- Pengajuan revisi anggaran Hibah Langsung Uang Realisasi 20 s.d. 31 Des 25

31

- Penyetoran sisa UP/TUP

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

JANUARI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
				1	2	3
4	5	6	**7**	**8**	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	**19**	20	21	22	**23**	24
25	26	27	28	29	30	31

7

- SP3B BLU Realisasi 13 s.d. 31 Des 25
- SPM Pengesahan Belanja dengan potongan penerimaan pembiayaan dan penerimaan non nggaran
- SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS

8

- SPM-GUP Nihil/PTUP Tunai

19

- SPM Pengesahan Belanja Modal Tanah PSN

23

- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 31 Des 25